

TO WIN THE HEART AND MIND THE PEOPLE OF PAPUA: FUNGSI DAN PERAN BRIMOB DALAM OPERASI DAMAI CARTENZ 2022

Gunarld Patiran¹⁾, Chairul Muriman Setyabudi²⁾, Vita Mayastinasari³⁾

^{1,2,3}Universitas Indonesia, Indonesia

Email: patirangunarld@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Operasi Damai Cartenz di Papua yang menggantikan operasi sebelumnya yakni Operasi Nemangkawi dan menjelaskan perlunya pengembangan fungsi dan peran Brimob Polri selain fungsinya sebagai satuan pemukul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui oservasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelusuran berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi damai Cartenz 2022 di Papua tetap dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi dijalankan dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi preemtif dan preventif. Pendekatan melalui cara-cara kekerasan (represif) diminimalisir untuk menghindari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan untuk mendapatkan simpati masyarakat Papua. Untuk itu, personel Brimob sebagai satuan yang paling banyak diternjukkan dalam misi operasi damai dituntut untuk menguasai beragam peran dan fungsi selain menjalankan fungsinya sebagai satuan pemukul. Sehingga Polri perlu mengembangkan kompetensi personel Brimob seperti kemampuan untuk menjalankan fungsi intelijen, penyelidikan dan penyidikan, olah tempat kejadian perkara, komunikasi dan kehumasan.

Kata Kunci: Operasi Damai Cartenz; Papua; Pendekatan Kemanusiaan; Brimob

ABSTRACT

This study aims to explain the urgency of carrying out the Cartenz peaceful operation in Papua which replaced the previous operation, namely the Nemangkawi operation and to explain the need to develop the functions and roles of the mobile brigade in addition to its function as a batting unit. The research method used is a qualitative method. Data were obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through tracing various documents such as laws and regulations, operating plan documents, books, journals, etc. The research results show that the Cartenz 2022 peace operation in Papua is still needed to create stability, security and public order. Operations are carried out by prioritizing a soft approach through pre-emptive and preventive strategies. Approaches through violent (repressive) means are minimized to avoid accusations of human rights violations and to gain the sympathy of the Papuan people. For this reason, mobile brigade personnel as the unit most frequently deployed in peaceful operations missions are required to master various roles and functions apart from carrying out their function as a strike unit. So that the Indonesian police need to develop mobile brigade competencies such as the ability to carry out intelligence functions, investigations, processing crime scenes, communications and public relations.

Keywords: Cartenz Peaceful Operation; Papua; Soft Approach; Mobile Brigade

PENDAHULUAN

Persoalan Papua adalah persoalan kenegaraan dan demokrasi di Indonesia. Persoalan Papua telah menyita banyak energi sosial, politik, ekonomi, dan ideologi negara untuk menyelesaikan persoalan yang terus muncul dan bereskalasi (Sudarto dan Dwi Laksana, 2022). Penelitian LIPI menemukan adanya empat faktor penyebab permasalahan mendasar di Papua, yakni marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, dan proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah (LIPI, 2017).

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah Papua sejak masa Orde Baru (1970an) hingga saat ini. Pendekatan militeristik menimbulkan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menimbulkan bumerang politik bagi pemerintah Indonesia (Verdiansyah dan Yuniarti, 2009). Pendekatan sosial budaya yang dilakukan pemerintahan pada masa awal reformasi tidak membuat kondisi sosial politik di Papua menjadi lebih baik. Pemerintahan Joko Widodo memberikan *concern* yang lebih serius dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Pembangunan di segala bidang ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Papua bisa meningkat.

Berbagai pendekatan yang dilakukan pemerintah di Papua rupanya tidak membuat situasi keamanan di bumi Cenderawasih kondusif. Situasi keamanan di Papua masih saja bergejolak. Pergerakan dan rencana-rencana aksi masih terus digaungkan oleh kelompok-kelompok prokemerdekaan Papua dan proreferendum baik yang dilakukan kelompok bersenjata maupun kelompok politik. Pergerakan kedua kelompok tersebut hingga saat ini masih menjadi ancaman nyata. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang dan membunuh warga sipil dan

aparat TNI dan Polri, merusak fasilitas publik, dan melakukan teror. Kelompok Kriminal Politik (KKP) membangun kekuatan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif di berbagai wilayah kabupaten yang ada di Papua. Gerakan-gerakan KKB maupun KKP meski terkesan pragmatis, namun tetap memiliki alasan dasar ideologi (*basic reason*) yakni keinginan memisahkan diri dari Indonesia (Renops, 2022)

Polri melakukan pemetaan dan melakukan analisis ancaman dan gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh gerakan KKB dengan membagi tiga zona yakni Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau. Pada Zona Merah, pergerakan KKB terkonsentrasi di lima kabupaten yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya. Sebanyak 11 kabupaten ditetapkan Zona Kuning, dimana daerah ini masih ada potensi ancaman dan gangguan keamanan namun pergerakannya tidak terlalu aktif, dan menjadi jalur distribusi senjata dan amunisi. Sebelas kabupaten tersebut adalah Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Diyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Nabire. Sedangkan 13 kabupaten masuk Zona Hijau yakni aman dari gangguan KKB dan jaringannya, yakni Kabupaten Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yalimo, Sarmi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Nufor, dan Supiori (Renops, 2022).

Potensi ancaman dan gangguan keamanan di Papua tidak hanya berasal dari gerakan KKB tetapi juga dari gerakan KKP. Gerakan politik KKP menyuarakan sikap antipemerintah, ketidakpuasan terhadap pembangunan di Papua, dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI serta tuntutan referendum, masih terus disuarakan

dan dilakukan oleh berbagai kelompok. Kelompok yang gencar menyuarakan Papua merdeka antara lain KNPB (Komite Nasional Papua Barat, ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*), OPM (Organisasi Papua Merdeka), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dan kelompok lainnya. Serangkaian peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua didalangi oleh AMP dan KNPB. KNPB merupakan organisasi yang mendukung perjuangan pembebasan Papua dari NKRI dengan menggunakan jalur politik dan mediasi internasional. KPNB ditengarai berada dibalik gerakan mogok sipil nasional (Renops, 2022).

Tujuan gerakan KKB dan KKP adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga KKB dan KKP Papua dapat disebut juga sebagai separatisme. Berdasarkan sejarahnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, tergantung siapa yang membuat pernyataan, pihak Kepolisian menyebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai tindakan kriminal, sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), sebutan kata separatis yang berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia (Effendi dan Chrisna, 2021).

Pemerintah selanjutnya memberikan label teroris kepada KKB Papua. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 27 April 2021, menegaskan bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris (Kemenko Polhukam, 2021). Penetapan status teroris bagi KKB dikarenakan kegiatan mereka yang mengancam keselamatan jiwa semua pihak, dari warga sipil, Polri, TNI, hingga Tenaga Kesehatan. Landasan yuridis penetapan KKB sebagai kelompok teroris adalah karena gerakan KKB memenuhi unsur terorisme karena aksi yang dilakukannya menimbulkan suasana teror yang luas

terhadap masyarakat sipil Papua yang didorong motif politik memisahkan diri dari Indonesia (Hafiz dan Pratama: 2021).

Penetapan KKB sebagai teroris dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 angka (2) UU tersebut menyebutkan bahwa terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Perkembangan politik dan keamanan yang masih belum kondusif di Papua melandasi kebijakan Polri untuk tetap melanjutkan operasi dengan sandi Operasi Damai Cartenz 2022 Papua. Operasi Damai Cartenz 2022 Papua adalah operasi yang dijalankan oleh Polda Papua dengan dukungan atau *back up* dari Mabes Polri dan TNI dengan mengedepankan misi damai. Operasi Damai Cartenz 2022 Papua merupakan transformasi dari Operasi Nemangkawi yang telah dijalankan sejak tahun 2019 hingga berakhir pada 25 Januari 2021 (Renops, 2022). Dalam Operasi Damai Cartenz 2022, Polri mengedepankan pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emptif serta Preventif dibandingkan strategi Represif (*hard approach*).

Menurut Dahniel (2015), ketiga strategi tersebut lazim digunakan untuk kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan yang sering timbul di masyarakat. Ketiga strategi ini dikenal sebagai teori gunung es kepolisian proaktif. Strategi deteksi dini dan Pre-emptif efektif untuk menjawab ketika masalah

sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud dalam bentuk-bentuk potensi gangguan dan belum muncul ke permukaan dalam bentuk gangguan. Strategi Pre-emptif disini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana (Alam: 2010).

Menurut Dahniel (2015), strategi Preventif menitikberatkan pada seperangkat kegiatan proaktif ketika masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan. Fungsi Preventif dilakukan melalui seperangkat tindakan pencegahan (*prevention*) agar tidak terjadi gangguan, ketidak-teraturan, pelanggaran, dan kejahatan. Menurut Baharudin Lopa (2001), langkah-langkah preventif dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif, dan meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Strategi Represif diperlukan untuk menjawab ketika eskalasi masalah sosial telah muncul ke permukaan dan terwujud sebagai gangguan yang nyata atau disebut sebagai ancaman faktual (Dahniel, 2015). Gangguan nyata diatasi dengan melakukan penegakan hukum (represif). Penegakan hukum ditempuh melalui pengumpulan informasi dan penyelidikan. Strategi ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman/ sanksi.

Operasi Damai Cartenz 2022 Papua melibatkan 1.922 personel Polri yang berasal dari Polda Papua, Masbes Polri dan

TNI. Dari jumlah personel sebanyak itu, anggota Brimob menjadi satuan terbanyak yang diterjunkan dalam Operasi Damai Cartenz 2022 Papua, yakni sebanyak 1.174 personel (Renops Damai Cartenz, 2022). Brimob adalah satuan elit tertua di tubuh Polri yang bertugas mengatasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk didalamnya melakukan tindakan pencegahan kejahatan yang terorganisasi dan berintensitas tinggi yakni kejahatan yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif, memerangi terorisme, mengatasi konflik sosial, tindakan anarkis, huru hara, dan kejahatan khusus yang dilakukan dengan melakukan fungsi intelijen, pencarian dan penyelamatan kepada masyarakat. Brimob berfungsi sebagai satuan pamungkas (*striking force*) dalam mengatasi kejahatan tersebut. (Komnas HAM, 2019).

Brimob Polri akan banyak berinteraksi dengan masyarakat Papua selama menjalankan operasi damai. Mereka ditempatkan dalam beberapa satuan tugas (Satgas) seperti Satgas Binmas Noken, Satgas Preventif, dan Satgas Penegakkan Hukum. Sehingga diversifikasi fungsi dan peran dibutuhkan untuk menjalankan misi operasi damai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah diversifikasi memiliki beberapa makna yakni penganekaragaman, penganekaragaman usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi (KBBI, 2016). Konsep diversifikasi lebih banyak digunakan dalam bidang pertanian, ekonomi, dan keuangan. Dalam konteks penelitian ini, konsep diversifikasi dalam fungsi dan peran Brimob digunakan untuk menjelaskan adanya perluasan atau pengembangan beberapa fungsi dan peran Brimob seperti fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyelidikan, dan fungsi kehumasan.

Diversifikasi fungsi dan peran Brimob menuntut peningkatan kemampuan (*competency*) sumber daya manusia

(SDM) Brimob dalam berbagai hal. Pengembangan kompetensi SDM Brimob ini penting agar tujuan pelaksanaan operasi damai tercapai secara maksimal. Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi adalah karakteristik mendasar yang berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dari suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurutnya, kompetensi inti (*core competence*) memiliki lima karakteristik dasar: pengetahuan, keterampilan, kepribadian, motivasi, dan konsep diri. Peningkatan kompetensi SDM Brimob dalam menjalankan tugas Operasi Damai Cartenz 2022 Papua ini penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam operasi tersebut tidak ringan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: (1) Mengapa diperlukan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua?; (2) Bagaimana peran dan fungsi Brimob dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua?. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini akan menjelaskan urgensi Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua dan menjelaskan peran dan fungsi Brimob serta pengembangan kompetensi SDM Brimob yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2022.

METODE

Metode penelitian merupakan cara melakukan suatu penelitian (Hasan, 2002). Senada dengan Hasan, Arikunto menyatakan bahwa metode penelitian berkaitan dengan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya, yang dapat dilakukan wawancara, observasi, maupun dokumentasi (Arikunto, 2002). Lebih jauh Subagyo (2006) mengatakan bahwa metode penelitian digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai teknik

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diamati. Pendekatan ini bersifat holistik dan ditujukan kepada individu. Sedangkan menurut Arikunto (2010), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan dan gejala yang sudah ada sebelumnya, yaitu keadaan gejala pada saat survei dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat mengungkapkan fenomena tentang subjek yang ingin dipelajari secara mendalam.

Jenis penelitian kualitatif ini melibatkan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan (Arikunto, 2002). Penelitian lapangan ini menggunakan observasi dan wawancara dalam bentuk studi kasus. Menurut Tohirin (2013), studi kasus berdasarkan metode kualitatif menggabungkan alat wawancara dan observasi untuk menyoroti berbagai faktor dan fenomena hubungan sosial dalam situasi tertentu dan berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan (Sugiyono, 2017). Sedangkan data sekunder yang merupakan data pendukung diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian sumber pustaka, seperti buku, jurnal, hasil karya ilmiah, peraturan perundangan-undangan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Operasi Damai Cartenz 2022 Papua

Kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memiliki akar sejarah yang panjang. Kekerasan menjadi siklus yang terus berulang sejak integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1969. Menguatnya gerakan sipil Papua

yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, mendorong otoritas negara melakukan operasi militer guna mengeleminir gerakan-gerakan antipemerintah RI. Menurut catatan Komnas HAM, setidaknya telah dilancarkan 44 operasi militer di wilayah Papua sejak 1961 hingga 1998. Operasi militer yang digelar di Papua diantaranya Operasi Operasi Jayawijaya, Operasi Wisnumurti, Operasi Tumpas, Operasi Bratayudha, Operasi Sadar, Operasi Wibawa, Operasi Pamungkas, Operasi Koteka, dll. (Elsam, 2022).

Operasi militer yang bertujuan menumpas gerakan separatisme yang dilakukan KKB, justru menimbulkan persoalan serius karena pemerintah Indonesia dinilai melakukan pelanggaran HAM di Papua. Menurut Elsam (2022), Salah satu lembaga nonpemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an), diperkirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban kekerasan aparat. Operasi Tumpas pada 1970 hingga 1985 untuk melumpuhkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) digelar dengan mengerahkan pesawat pembom yang mengakibatkan hancurnya 17 desa dan diperkirakan menelan korban ribuan jiwa, termasuk kelompok anak-anak, orang tua dan perempuan, di wilayah sekitar pegunungan Jayawijaya (Elsam, 2022). Setelah itu, kekerasan terus berlangsung baik yang dilakukan gerakan KKB maupun oleh aparat TNI/ Polri.

Narasi pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap masyarakat Papua juga menjadi catatan Amnesty Internasional yang datanya dirilis pada 2018. Laporan menyajikan data pelanggaran HAM dari tahun 2010-2018. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 41 kasus dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa non-politik. Sebanyak 56 orang tewas di tangan aparat keamanan. Dugaan pelanggaran HAM oleh aparat tersebut terjadi dalam beberapa peristiwa seperti pembubaran unjuk rasa damai,

penanganan insiden kekacauan yang terjadi di masyarakat, penanganan atau penertiban terhadap pelanggaran individual oleh petugas keamanan tanpa melalui proses hukum. Disamping itu, Amnesty Internasional juga mencatat telah terjadi 69 kasus dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan yang berhubungan dengan dengan urusan politik seperti isu tuntutan kemerdekaan dan tuntutan referendum. Dari total 69 kasus, 28 kasus diantaranya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 39 orang dari masyarakat sipil di Papua (Kusuma, dkk., 2022)

Riset yang dilakukan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) menemukan bahwa sejak 2010, pelaku kekerasan di Papua didominasi oleh gerakan KKB yang merupakan kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Jumlah kasusnya meningkat pesat dalam kurun waktu enam tahun (2016-2021). Gerakan KKB kerap melakukan provokasi bahkan penyerangan ke pos-pos militer dan polisi. Di saat bersamaan, penduduk baik penduduk asli Papua maupun pendatang, tak luput dari teror KKB (The Conversation, 2022). Pola kekerasan yang dilakukan KKB juga semakin brutal, seperti pembakaran rumah, tempat usaha, fasilitas publik, penjarahan, pemerkosaan, penyanderaan, penembakan hingga pembunuhan.

Komnas HAM mencatat 1.182 kasus kekerasan di Papua baik yang dilakukan oleh gerakan KKB maupun oleh aparat TNI/ Polri dalam kurun waktu 2020-2021. Sebanyak 41,31 persen dari total kasus kekerasan itu berkaitan dengan kerja-kerja anggota Polri. Bentuk kekerasan yang terjadi diantaranya penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran, perusakan barang atau bangunan hingga kontak senjata antara aparat dengan warga sipil. Kekerasan yang dilakukan polisi selama kurun waktu dua tahun sebanyak 71 kasus, penyiksaan 45 kasus, intimidasi 6 kasus, penangkapan sewenang-wenang 35 kasus, penahanan

sewenang-wenang 18 kasus, penanganan lambat 162 kasus, kriminalisasi 57 kasus, dan kematian tahanan 11 kasus (CNNIndonesia, 2022).

Pemerintah memutuskan tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan yang represif dalam menyelesaikan persoalan Papua karena stigma pelanggaran HAM. Pemerintah mengklaim tidak ada lagi operasi militer di Papua. Menurut pemerintah, penempatan TNI dan Polri di wilayah Papua sebagai operasi teritorial atau kewilayahan seperti juga dilakukan di wilayah lain di luar Papua. Operasi Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan antara Polri dan TNI dengan pendekatan keamanan untuk memburu para pelaku KKB digantikan dengan pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) melalui Operasi Damai Cartenz yang dijalankan sejak Januari 2022.

Pendekatan kemanusiaan dalam Operasi Damai Cartenz 2022 dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah; (2) Mendorong stakeholder dan counterpart untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua; (3) Menjamin terciptanya rasa aman masyarakat di seluruh wilayah Papua; (4) Meningkatkan peran serta Gereja, masyarakat adat, dan pemerintah dalam rangka penanggulangan KKB serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; (5) Mempersempit ruang gerak KKB yang menggunakan propaganda ideologis, kegiatan politik dan organisasi serta aksi yang menggunakan kekuatan bersenjata; dan (6) Melaksanakan penegakan hukum terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana yang dilakukan tokoh dan aktivis, militan, dan pendukung gerakan KKB (Renops, 2022).

Pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) dijalankan melalui implementasi berbagai program kegiatan dalam Program Binmas Noken. Binmas merupakan sebuah

fungsi di kepolisian yang dipadukan dengan ‘noken’ yang merupakan konsep kearifan lokal bermakna kemakmuran, keluhuran, dan keagungan (*dignity*) masyarakat Papua (Rudi Sudarto dan Dwi Laksana, 2022). Pendekatan kemanusiaan yang dilakukan Polri dijalankan oleh Satgas Binmas Noken melalui pembangunan masyarakat/manusia (*community development*) yang melibatkan peran aktif masyarakat Papua.

BrokenshadanHodgemendefinisikan pembangunan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat. *Community development* haruslah bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan seluruh masyarakat melalui cara mendorong masyarakat lebih berperan aktif dan juga terus memotivasi mereka agar pembangunan masyarakat tersebut dilakukan atas prakarsa masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Binmas Noken maka satuan tugas yang terlibat harus mempunyai kemampuan merancang strategi bagaimana mendekatkan diri, mengajak, dan mendorong masyarakat Papua ikut terlibat dalam kegiatan program Binmas Noken (Rudi Sudarto dan Sumarno, 2022).

Operasionalisasi program Binmas Noken pada Operasi Damai Cartenz 2022 secara teknis dilakukan melalui program-program yang dipadukan dengan jargon kearifan lokal masyarakat Papua, seperti: (1) Kasuari (Kesejahteraan untuk Anak Negeri); (2) Koteka (Komunikasi Tokoh Elit Pengendali Kantibmas); (3) Si-Ipar (Polisi Pi Ajar); (4) Peka (Peduli Kantibmas); (5) Matoa (Milennial Torang Maju); (6) Tifa (Torang Insan Faham Adat). Keseluruhan konsep operasionalisasi Binmas Noken diharapkan dapat menjadi solusi bagi Polri dalam berkontribusi pada upaya percepatan pembangunan Papua untuk ‘*To win the hearts and minds the people of Papua.*’

Peran dan Fungsi Brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022

Berdasarkan tugas, fungsi dan peran yang diembannya, Brimob Polri menjadi kesatuan yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam posisinya yang demikian, Brimob menjadi kesatuan yang rentan mendapat predikat sebagai pelaku pelanggaran HAM jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku. Tugas Brimob yang paling menonjol dan rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM adalah penanggulangan huru-hara, perlawanan teror dan penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi (Komnas HAM, 2019).

Operasi Damai Cartenz 2022 berdasarkan Rencana Operasi (Renops, 2022) melibatkan 1.922 personel Polri yang berasal dari Polda Papua, Masbes Polri dan TNI. Dari jumlah personel sebanyak itu, 554 personel berasal dari Polda Papua, 1.267 personel berasal dari Mabes Polri, dan 101 personel dari TNI. Dari jumlah 554 personel Polda Papua yang diturunkan dalam operasi damai ini, 214 personel berasal dari Satbrimobda (Satuan Brimob Polda) Papua. Sedangkan dari personel Mabes Polri, dari jumlah 1.267 personel sebagian besar berasal dari Korbrimob yakni sebanyak 1.174 personel.

Pada Operasi Damai Cartenz 2022, personel Brimob yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban yang berkadar dan berintensitas tinggi, ditempatkan di Satgas Preventif, Satgas Gakkum (penegakan hukum), dan Satgas Binmas Noken. Tugas personel Brimob di Satgas Preventif pada Operasi Damai Cartenz 2022 antara lain melakukan patroli dialogis di wilayah operasi, melakukan patroli taktis, penjagaan di wilayah operasi, pengamanan di area Binmas Noken, pengamanan obyek vital, razia, dan pengamanan aksi unjuk rasa

yang terjadi di wilayah Papua (Renops, 2022).

Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) pada Operasi Damai Cartenz 2002 menjalankan tugas deteksi dini terhadap gerakan KKB, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap KKB. Tugas deteksi dini ini antara lain melakukan monitoring dan menganalisa komunikasi dan mobilitas jaringan KKB, melakukan pemetaan jaringan komunikasi KKB di Papua sehingga semua kelompok terpantau pergerakannya, dan menganalisa konten-konten pro dan kontra pemerintah maupun kepolisian sekaligus *profiling* terhadap akun-akun yang pro KKB.

Tugas penyelidikan antara lain menyelidiki jaringan penyuplai senjata api dan amunisi, melakukan penyelidikan terhadap yang diduga pelaku tindak pidana yang dilakukan KKB, mencari dan membina informan dalam rangka menggali data intelijen yang mendukung penegakan hukum, tim lidik lapangan yang mampu melakukan penjejakan, pembuntutan target-target sesuai kondisi geografis alam Papua dengan peralatan teknologi secara terus menerus dan berkelanjutan, menjalin kerjasama dengan komunitas intelijen di Papua, menjalin kerjasama dengan *Criminal Justice System* di Papua, dan melakukan patroli siber (Renops, 2022).

Tugas penindakan antara lain melakukan patroli dan penegakan hukum dengan sasaran orang, tempat dan kegiatan untuk mempersempit ruang gerak KKB, melakukan pengamanan terhadap orang, tempat, dan kegiatan Satgas lainnya, melakukan penegakan hukum berupa pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana oleh KKB, melaksanakan identifikasi awal sesaat setelah melakukan penegakan hukum terhadap KKB, dan melakukan pemetaan dan update pemetaan KKB berdasarkan informasi dari Satgas lainnya maupun yang berasal dari masyarakat.

Personel Brimob yang terlibat dalam Satgas Preventif dan Satgas Gakkum pada Operasi Damai Cartenz 2022 ditempatkan antara lain di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya. Oleh Polri, kelima daerah ini masuk dalam Zona Merah atau Zona Perang. Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari 34 distrik dan 277 kampung. Di kabupaten ini, gerakan KKB dipimpin oleh Lamek Alipki Taplo yang memiliki pasukan sekitar 100 orang. Pasukan Lamek dilengkapi dengan senjata api. Kasus penembakan yang dilakukan kelompok KKB di daerah ini sangat menonjol dan memakan korban dari TNI, Polri, dan masyarakat sipil Papua. Selama Operasi Nemangkawi 2021, 1 personel TNI meninggal dan 5 luka, 2 anggota Polri meninggal dan 1 luka, dan 1 orang dari masyarakat sipil meninggal dan 9 luka akibat kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB (Renops, 2022).

Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 distrik, 510 kampung dan 1 kelurahan. Untuk menjangkau wilayah ini tidak mudah karena 49 distrik harus ditempuh melalui jalur udara. Gerakan KKB di Yahukimo dipimpin oleh Tendius Gwijangge yang didukung puluhan pasukan dan senjata api. Kasus penembakan di daerah ini juga menonjol. Selama Operasi Nemangkawi 2021, 3 anggota TNI meninggal dan 2 luka tembak, 5 anggota Polri mengalami luka tembak, dan 3 orang sipil Papua meninggal dan 4 mengalami luka tembak.

Kabupaten Nduga terdiri dari 32 distrik dan 248 kampung dengan ibukota Kemyan. Gerakan KKB di Nduga dipimpin oleh Egianus Kogoya dengan dukungan sekitar 50 orang pasukan yang dilengkapi senjata api. Kejadian penembakan yang memakan korban juga menonjol di daerah ini. Selama Operasi Nemangkawi 2021, 2 anggota TNI meninggal dan 5 luka tembak, 1 orang masyarakat sipil Papua meninggal dan 2 orang mengalami luka tembak

akibat serangan bersenjata yang dilakukan kelompok KKB (Renops, 2022).

Kabupaten Puncak terdiri dari 25 distrik dan 206 kampung dengan ibukota berada di Ilaga. Gerakan KKB di daerah ini dipimpin oleh Goliath Tabuni, Lekagak Telenggen, dan Numbuk Telenggen. Kelompok KKB ini didukung oleh sekitar 100 pasukan yang dilengkapi dengan senjata api. Kasus penembakan di Kabupaten Puncak juga menonjol. Selama Operasi Nemangkawi, 2 anggota TNI meninggal dunia dan 5 luka tembak, 1 personel Polri meninggal dan 3 luka tembak, sedangkan dari masyarakat sipil yang menjadi korban sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka tembak (Renops, 2022).

Kabupaten Intan Jaya terdiri dari 8 distrik dan 97 kampung dengan ibukotanya berada di Sugapa. Gerakan KKB di Intan Jaya dipimpin oleh Sabinus Walker dan Undius Kogoya yang didukung oleh sekitar 50 orang dan dilengkapi senjata api. Kasus kekerasan bersenjata di Intan Jaya juga menonjol. Selama Operasi Nemangkawi 2021, kekerasan bersenjata oleh KKB telah mengakibatkan 4 anggota TNI meninggal dan 2 luka tembak dan 2 orang sipil Papua meninggal dunia dan 3 mengalami luka tembak (Renops, 2022).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua lebih mengutamakan tindakan Preventif dan Preventif. Dengan demikian, penggunaan kekuatan dan senjata api oleh personel Brimob yang bertugas di Satgas Preventif dan Satgas Gakkum dalam penanganan gerakan KKB harus diminimalisir atau nir-militer. Personel Brimob harus tampil lebih elegan dan menghindari cara-cara yang terkesan represif dalam menangani kegiatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh gerakan KKB dan kelompok lainnya di Papua.

Personel Brimob yang bertugas di Operasi Damai Cartenz 2022 untuk itu

dituntut harus memahami norma-norma dan prinsip-prinsip HAM yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Brimob ketika menjalankan tugas, fungsi, dan perannya. Norma-norma yang wajib diketahui dan dipatuhi anggota Korbrimob antara lain Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan atau Tindakan Keras dan Senjata Api, dan Prosedur Tetap Kapolri Nomor. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki (Komnas HAM, 2019).

Brimob misalnya dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api secara berlebihan, memastikan menggunakan tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan terlebih dulu dalam menangani kegiatan yang membutuhkan penggunaan kekuatan, tindakan keras, dan senjata api. Kekerasan hanya diterapkan bila sangat diperlukan, memastikan tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah, memastikan penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional, memastikan penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi, memastikan adanya pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.

Personel Brimob juga harus dapat meminimalisir kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras, memastikan penggunaan senjata api hanya digunakan untuk melindungi nyawa manusia, wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak, wajib memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat

penggunaan senjata api, memastikan pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, memastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat, dan dilarang melepaskan tembakan kepada organ vital manusia (Komnas HAM, 2019).

Personel Brimob wajib memiliki pengetahuan tentang batasan sesuai norma yang diatur dalam Peraturan Kapolri maupun Protap dalam menangani unjuk rasa yang di Papua. Dalam penanganan unjuk rasa, personel harus dapat berkomunikasi dengan masyarakat/orang/pendemo dengan sopan dan tegas, dilarang bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, dilarang melakukan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, dilarang mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki, dan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa, dan wajib menghormati HAM dari setiap orang yang sedang melakukan huru-hara.

Anggota Brimob juga wajib melindungi jiwa raga dan harta benda, menghindari emosi atau terpancing dengan emosi pendemo, dilarang melakukan kegiatan yang memancing masyarakat/pendemo marah/tindakan kontra produktif, dilarang membalas tindakan pendemo seperti melempar batu, memukul atau menganiaya, dilarang melakukan tindakan penganiayaan pada masyarakat/orang/pendemo yang sudah dalam keadaan menyerah, dan dilarang melakukan sweeping dan merusak barang-barang pendemo. Kepatuhan anggota Brimob yang bertugas Dalam Operasi Damai Cartenz

2022 pada norma-norma, peraturan, dan kode etik kepolisian bisa menghindari tuduhan sebagai pelaku pelanggaran HAM yang seringkali dijadikan isu politis oleh kelompok KKB dan jaringan.

Selain ditempatkan di Satgas Preventif dan Satgas Gakkum, personel Brimob juga ditempatkan di Satgas Binmas Noken. Dalam Rencana Operasi (Renops, 2022) diuraikan tugas Satgas Binmas Noken, diantaranya: (1) menjalankan Program Kesejahteraan Untuk Anak Negeri atau Kasuari meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan perindustrian; (2) menjalankan Program Komunikasi Tokoh Elit Pengendali Kantibmas atau Koteka meliputi komunikasi dengan tokoh agama, adat, pemuda, mahasiswa dan pimpinan kerukunan; (3) menjalankan Program Polisi Pi Ajar atau Sipar yang meliputi kegiatan trauma healing, belajar sambil bermain, dan mengisi pelajaran di sekolah; (4) menjalankan Program Peka atau Peduli Kantibmas yang meliputi keamanan lingkungan, pos kamling, dan *community policing*; (5) menjalankan Program Tifa atau Torang Insam Faham Adat meliputi kegiatan pengembangan pariwisata; dan (6) menjalankan Program Matoa (Millennial Torang Maju) yang meliputi kegiatan diskusi, karya ilmiah remaja, dll.

Keterlibatan Brimob dalam Satgas Preventif, Satgas Gakkum, dan Satgas Binmas Noken sebenarnya berada diluar fungsi dan peran Brimob sebagai satuan pemukul Polri. Untuk itu, Polri perlu melakukan diversifikasi fungsi dan peran melalui pengembangan kompetensi Brimob agar dapat menjalankan beragam peran dalam Operasi Damai Cartenz 2022. Pengembangan kompetensi Brimob dalam berbagai hal seperti kemampuan intelijen, kemampuan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemampuan melakukan olah tempat kejadian perkara, kemampuan komunikasi yang baik (kehumasan), kemampuan mengajar, kemampuan

bahasa Papua, kemampuan bertani, dan sebagainya, dapat dilakukan SDM Polri dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Brimob yang akan bertugas dalam operasi damai.

Polri juga perlu menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan terinci dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2022. Standar operasi ini penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Selain menjadi pedoman atau panduan, SOP juga sekaligus memuat batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota Brimob. Batasan ini penting agar anggota Brimob yang menjalankan fungsi dan perannya dalam Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua tidak terjebak dalam isu pelanggaran HAM.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut.

1. Kekerasan yang dilakukan gerakan KKB yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan isu pelanggaran HAM menjadi alasan pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2022. Operasi dilakukan dengan mengedepankan soft approach melalui Program Binmas Noken untuk mengubah rasa kebencian menjadi rasa simpati kepada pemerintah Indonesia serta untuk menciptakan Papua yang damai dan sejahtera.
2. Diversifikasi fungsi dan peran Brimob dibutuhkan agar misi Operasi Damai Cartenz 2002 tercapai. Pendidikan dan pelatihan tantang fungsi-fungsi intelijen, penyelidikan dan penyidikan, kehumasan, dan lain-lain bagi anggota Brimob perlu dilakukan SDM Polri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam operasi damai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahniel, Rycko Amelza, et.al. 2015. *Ilmu Kepolisian*. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press
- Effendi, Tholib dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, 2021, Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana, *Jurnal Rechildee*. 16 (2)
- Hafiz, Muhammad dan Surya Mukti Pratama. (2021). Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7 (1): 87-104
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
<https://referensi.elsam.or.id/2014/12/operasi-militer-papua/>. Diakses pada 12 November 2022.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480-kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni-polri-kkb>. Diakses pada 12 November 2022.
- KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 Juni 2022].
- KemenkoPolhukam, H. (2021). Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/>. Diakses 12 November 2022
- KOMNAS HAM. 2019. Buku Saku HAM Korps Brimob Polri. <https://www.komnasham.go.id/files/20201023-buku-saku-ham-korps-brimob-polri-SU0HTY.pdf>, di akses Pada 01 Juli 2022.
- KOMNAS HAM. 2019. *Pelatihan Dasar HAM bagi 150 Anggota Satuan BRIMOB di Papua*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/19/426/pelatihan-dasar-ham-bagi-150-anggota-satuan-brimob-papua.html>, di akses Pada 01 Juli 2022 Pukul 13.20 WIB.
- Kusuma, Ardli Johan, dkk. (2022). Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Menjadi Organisasi Teroris oleh Pemerintah Indonesia. *Journal of Government, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. 7 (1): 1-22
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. *LIPi Temukan 4 Akar Masalah di Papua*. <https://nasional.tempo.co/read/1242284/peneliti-lipi-ungkap-empat-akar-permasalahan-di-papua>, di akses Pada 10 November 2022 Pukul 10.12 WIB.
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./2022, Polda Papua, Jayapura
- Rudi Sudarto, Eko dan Chryshnanda Dwi Laksana. (2022). *Binmas Noken: Konsep dan Implementasinya dalam Pandangan Prof CDL*. Jakarta: Pensil

- Rudi Sudarto, Eko dan Sukarman Dj Sumarno. (2022). *Pendekatan Humanis Merebut Hati Papua*. Jakarta: Serat Alam Media
- Spencer, L.M., & Spencer, S.M. (1993). *Competence at work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley and Sons.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tohirin. (2013). *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Verdiansyah, Chris dan Fandri Yuniarti. 2009. *Ekspedisi Tanah Papua*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas